**HASIL PENGAWASAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN :**

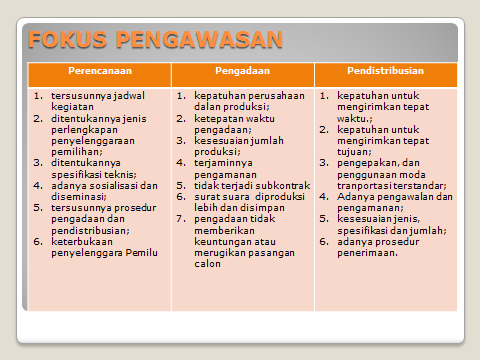
**POTRET HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA**

**DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015**

1. **Pengantar**

Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dan dilengkapi juga dengan alat kerja pengawasannya, melakukan pengawasan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dengan ruang lingkup dan fokus pengawasan sebagai berikut :





Adapun langkah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu dalam mengawasi perencanaan, pengadaan dan distribusi adalah sebagai berikut, yaitu a) berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilihan untuk mendapatkan data dan informasi, yang meliputi jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara, jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan, spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan, mekanisme pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara yang akan digunakan, peta atau zona pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara dan mekanisme pengamanan perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara, b) melakukan penelusuran dokumen dan mengkaji terhadap penentuan standar, penentuan kebutuhan dan proses lelang dan/atau langkah lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan LKPP untuk mengetahui perencanaan proses lelang perlengkapan penyelenggaraan pemilihan secara elektronik melalui LPSE sesuai tingkatnya, dan c) memberikan saran perbaikan bila ditemukan potensi permasalahan dan pelanggaran terhadap proses perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, dan dengan menggunakan mekanisme pengawasan berdasarkan laporan Indeks Kerawanan Pemilu, Laporan *on the week* Panwas, Surat Edaran Bawaslu, dan FGD dan Workshop di Daerah, maka dapat dilaporkan **Hasil Pengawasan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan; Potret Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.**

1. **Hasil Temuan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya**
2. **Keterlambatan pencetakan dan distribusi bahan sosialisasi dan kampanye**

Keterlambatan pencetakan dan distribusi bahan sosialisasi dan kampanye sebagai bagian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan sudah menjadi kenyataan dihampir separuh Kabupaten dan Kota yang melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Keterlambatan tersebut telah membuka ruang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dengan membuat dan memasang sendiri alat peraga kampanye, dan adanya keberatan atas keterlambatan terhadap pencetakan, serta yang paling mungkin adalah berpengaruh terhadap proses pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan digunakan saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015.

**Tidak Sesuai Jadual**

Sumsel, Bengkulu, Babel, Lampung, Jabar, Banten, DIY, Jatim, Kalbar, Kalteng, Sultra, NTB, Bali (13 Prov)

**Sesuai Jadual**

Sumut, Sumbar, Kepri, Riau, Jambi, Jateng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sulut, Gorontalo, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat (19 Prov)

1. **Pasangan calon mencetak alat peraga akibat keterlambatan pencetakan bahan sosialisasi dan kampanye**

Keterlambatan tersebut dikarenakan beberapa faktor, antara lain ; a) pasangan calon terlambat menyerahkan data dan kelengkapan yang akan menjadi konten bahan sosialisasi dan kampanye, walaupun sejak proses verifikasi pencalonan sudah disampaikan dan ingatkan; b) adanya keinginan khusus pasangan calon yang menyulitkan KPU segera melakukan pencetakan, misalnya foto yang diberikan bukanlah foto dua bulan terakhir, atau foto hasil hasil rekayasa IT yang tidak diperbolehkan sementara pasangan calon tetap memaksakan; c) adanya tender ulang karena tender sebelumnya dianggap menyalahi prosedur yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; d) dalam aturan teknisnya tidak ada unsur batasan waktu, dan sanksi keterlambatan bagi pasangan calon yang melanggar.

Faktor Keterlambatan pencetakan

a) Paslon terlambat menyerahkan data

b) Adanya keinginan khusus pasangan calon

yang menyulitkan KPU segera melakukan

pencetakan.

c) Tender ulang

d) Tidak ada batasan waktu dan sanksi

keterlambatan

Tidak ada :

Sumut, Jateng, Riau , Sulsel, Sulut, Jambi, Kalsel, Kaltim, Kaltara, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

1. **Disparitas KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah atau belum melakukan pencetakan dan distribusi**

Disparitas terhadap sudah atau belum dilakukannya pencetakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, bahkan kemungkinan keterlambatan pencetakan surat suara oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi kekuatiran sebagaimana dilaporkan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Disparitas atau bahkan keterlambatan yang ada disebabkan dua permasalahan yaitu keterlambatan penyusunan jadwal akibat saling silang dengan pengadaan dan distribusi bahan sosialisasi dan kampanye, dan persoalan sengketa pencalonan yang menghambat penetapan dan penentuan kebutuhan dan spesifikasi surat suara.

Provinsi Papua dan Maluku adalah Provinsi yang paling banyak menyumbang Kabupaten/Kotanya belum mencetak surat suara sampai dengan tanggal 18 November 2015 belum mencetak surat suara, bahkan belum melakukan penetepan kebutuhan dan spesifikasi,. Selain dua provinsi tersebut, maka terdapat tujuh provinsi lainnya dianggap memiliki permasalahan pencetakan surat suara, baik karena masalah penunjukan, tidak sesuai spesifikasi dan jumlah serta rusak akibat proses distibusi.

1. **Kegiatan perencanaan dan pengadaan logistik pemilihan yang paling banyak dilanggar**

Bawaslu Provinsi telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan, proses produksi dan distribusi dengan bentuk a) pengawasan penyusunan jadwal kegiatan, b) identifikasi kebutuhan dan spesifikasi, c) prosfektus perusahaan yang menjadi rekanan KPU dalam pengadaan, d) pencermatan dokumen lelang dan e) pengawasan langsung proses produksi di pabrik.

Berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dari Panwas Kabupaten/Kota, bentuk kegiatan yang paling banyak dilanggar oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai urutannya adalah *pertama*, penyusunan jadwal kegiatan khususnya dalam kaitan ketepatan waktu perkiraaan dan implimentasinya; *kedua*, identifikasi kebutuhan dan spesifikasi karena masih terdapat kekurangan pada proses cetak perlengkapan kebutuhan; *ketiga*, proses produksi di pabrik mencakup pencetakannya dan keamanan *; keempat*, prosfektus perusahaan yang menjadi rekanan KPU dalam pengadaan mencakup fortofolio perusahaan yang tidak baik; dan *kelima*, pencermatan dokumen lelang terkait ketidak sesuai data rekanan maupun ketidak tepatan penentuan jumlah.

1. **Adanya KPU didaerah yang tidak memberikan akses pengawasan**

Keterbukaaan dari sisi akses yang diberikan KPU Provinsi dan Panwas Kabuapten/Kota dalam perencanaan, proses produksi dan pendistribusian dinyatakan dengan beberapa pandangan. Tujuh provinsi mengganggap cukup baik akses informasi yang diberikan, sedangkan dua provinsi mengganggap akses yang diberikan kurang. Kurangnya akses yang diberikan dikarenakan beberapa hal, antara lain yaitu; a) lemahnya manajemen KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota itu sendiri, dan b) sikap yang tidak tranparan.

Pada kondisi yang seperti ini Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota terus berupaya secara aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota guna memastikan semua kegiatan dalam perencanaan, proses produksi dan pendistribusian dapat dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

1. **Pelanggaran yang terjadi dipabrik-pabrik pencetak perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya**

Mengantisipasi pelanggaran dalam proses produksi dan distribusi di pabrik, pengawas pemilihan harus melakukan pengawasan melekat dengan tujuan antara lain, yaitu a) kesesuian keberadaan dan keadaan pabrik sesuai dengan dokumen pemenang lelang dari sisi kepemilikan dan standar keamanan dan kelayakan, b) alat produksi dan dukungannya sesuai dokumen pemenang lelang, c) proses pencetakan tepat waktu dan sesuai jumlah, dan d) proses distribusi dari pabrik ke Kabupaten/Kota sesuai standar pengepakan yang benar dan tepat sasaran.

Dalam rangka mengukur pelanggaran hal tersebut, berdasarkan laporan dari Bawaslu Provinsi berdasarkan laporan Panwas Kabupaten/Kota, maka dibuat pemetaan terhadap pelanggaran proses produksi dan distribusi di pabrik pencetakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang terjadi, yaitu sebagai berikut :

1. **Wilayah rawan distribusi**

Wilayah rawan distribusi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya ditemukan di tiga provinsi yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Wilayah-wilayah ini telah dipetakan berdasarkan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, dan identifikasi yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan telah dikoordinasikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Wilayah rawan distribusi di setiap provinsi berbeda-beda jumlahnya. Hal tersebut ditentukan oleh oleh beberapa faktor, antara lain faktor geografis seperti gunung, sungai dan lautan, dan faktor kemanan, seperti adanya separatis dan acaman teror.

Provinsi Papua, Maluku dan NTT adalah provinsi terbanyak yang memiliki wilayah rawan distribusi. Provinsi Papua tujuh Kabupatennya (Membramo Raya, Asmat, Yalimo, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Waropen dan Boven Digoel) berada diwilayah pegunungan yang hanya bisa dilalui transportasi udara saja. Provinsi Maluku empat Kabupatennya (Kepulaun Aru, Buru Selatan, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat) berada diwilayah kepulauan dengan akses transportasiyang hanya bisa melalui jalan udara yang freweksi penerbangannya terbatas, dan laut yang memerlukan waktu berhari-hari untuk sampai lokasi. Provinsi NTT dua Kabuaptennya diwilayah kepulauan dan terluar, sehingga distribusi hanya dapat dilakukan hanya melalui udara dan jalan laut yang berbahaya karena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah-ubah. Selain tiga provinsi tersebut, enam provinsi lainnya juga memiliki wilayah rawan distribusi, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak dan masih bisa dijangkau.

Berdasarkan atas wilayah rawan tersebut, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota telah berkoordinasi dan menyampaikan peta rawan distribusi kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memastikan wilayah tersebut menjadi wilayah prioritas distribusi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.

1. **Kesimpulan**

* Pencetakan dan distribusi bahan sosialisasi dan kampanye sebagai bagian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan mengalami keterlambatan terjadi diseparuh Kabupaten dan Kota yang melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan dan Wakil Walikota;
* Ditemukan pasangan calon yang mencetak dan memasang bahan sosialisasi dan kampanye akibat keterlambatan pencetakan dan distribusi bahan sosialisasi dan kampanye oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
* Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pencetakan dan distribusi bahan sosialisasi dan kampanye a) pasangan calon terlambat menyerahkan data dan kelengkapan yang akan menjadi konten bahan sosialisasi dan kampanye, walaupun sejak proses verifikasi pencalonan sudah disampaikan dan ingatkan; b) adanya keinginan khusus pasangan calon yang menyulitkan KPU segera melakukan pencetakan, misalnya foto yang diberikan bukanlah foto dua bulan terakhir, atau foto hasil hasil rekayasa IT yang tidak diperbolehkan sementara pasangan calon tetap memaksakan; c) adanya tender ulang karena tender sebelumnya dianggap menyalahi prosedur yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; d) dalam aturan teknisnya tidak ada unsur batasan waktu, dan sanksi keterlambatan bagi pasangan calon yang melanggar.
* dan Kabupaten/Kota sesuai urutannya adalah *pertama*, penyusunan jadwal kegiatan khususnya dalam kaitan ketepatan waktu perkiraaan dan implimentasinya; *kedua*, identifikasi kebutuhan dan spesifikasi karena masih terdapat kekurangan pada proses cetak perlengkapan kebutuhan; *ketiga*, proses produksi di pabrik mencakup pencetakannya dan keamanan *; keempat*, prosfektus perusahaan yang menjadi rekanan KPU dalam pengadaan mencakup fortofolio perusahaan yang tidak baik; dan *kelima*, pencermatan dokumen lelang terkait ketidak sesuai data rekanan maupun ketidak tepatan penentuan jumlah.
* Adanya KPU didaerah yang kurang terbuka memberikan data dan akses pengawasan membuat hambatan kepada pengawas pemilu untuk melakukan pencegahan bilamana terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabuapten/Kota dalam perencanaan pengadaan dan pendistribusian.
* Bentuk Pelanggaran yang terjadi pada saat produksi Perlengkapan Pemilihan adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dokumen perusahaan; kesesuaian nama persusahaan, pemilik, alat produksi, jumlah pekerja, dan gudang;
2. Track record perusahaan; Terdaftar, rekam jejak, taat pajak, adanya izin, data pekerja dan total aset;
3. Kesesuaian kontrak; jumlah dan spesifikasi, tidak subkontrak;
4. Proses produksi; tepat spesifikasi, tepat jumlah, dan tepat waktu;
5. Keamanan proses produksi; petugas KPU, petugas keamanan, kelayakan gedung, fasilitas keamanan, prosedur keamanan;
6. Pengepakan; prosedur dan standar;
7. Pengawalan distribusi; petugas, moda transportasi dan penerimaan;

* Daerah rawan distribusi terbanyak berada di Kabupaten-Kabupaten di wilayah timur Indonesia dengan kondisi geografis yang menjadi hambatan utama, dan beberapa terkait soal keamanan yang menyangkut separatisme dan premanisme.